

Anggarkan Rp83,233 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

NANGA BULIK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau tidak main-main dalam menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Terbukti, untuk penanganan Covid-19, Pemkab Lamandau telah menganggarkan dana sebesar Rp83,233 miliar. Jumlah anggaran yang disiapkan Pemkab Lamandau tersebut, merupakan total anggaran yang didapat setelah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran hasil dari tiga tahap rasionalisasi APBD.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Lamandau, Muhammad Irwansyah dikonfirmasi Jumat (15/4) mengemukakan, total anggaran (percepatan penanganan) Covid-19 kita (Kabupaten Lamandau) setelah melakukan tiga kali rasionalisasi APBD jumlahnya mencapai Rp83,233 miliar rupiah.

Dijelaskan, didapatnya anggaran Rp83,233 miliar untuk dana percepatan penanganan dampak Covid-19 Pemkab Lamandau bersumber dari realokasi dan refocusing anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal. “Rp83,233 miliar ini merupakan hasil dari realokasi dan refocusing anggaran belanja barang dan jasa sebesar 35,93 persen dari total anggaran, serta diambil dari anggaran belanja modal yang persentasenya mencapai 39,63 persen dari total anggaran yang tersedia,” bebernya.

Menurutnya, Pemkab Lamandau terpaksa melakukan rasionalisasi APBD tahap ketiga karena hasil rasionalisasi yang dilakukan di tahap kedua sebesar Rp44,8 miliar dinilai belum cukup atau tidak sesuai ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKP) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan Nomor 119/2813/Sj, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Termasuk, tidak sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Pada rasional APBD tahap pertama, Pemkab Lamandau sebetulnya telah menyisihkan anggaran sebesar Rp14,919 miliar, namun pemerintah pusat menilai jumlah itu belum memadai untuk menanggulangi dampak dari wabah Covid-19 yang terjadi.

Begitupun hasil rasionalisasi tahap kedua yang mencapai Rp44,8 miliar ternyata juga dinilai masih tidak sesuai regulasi hingga berujung keluarnya sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan 35 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Lamandau yang jumlahnya setara dengan Rp12,386 miliar. **C-kar**

Sumber berita:

1. Tabengan, *Anggarkan Rp83,233 Miliar Untuk Penanganan Covid-19*, 16 Mei 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id>, *3 Kali Rasionalisasi Total Anggaran Covid-19 Kabupaten Lamandau Jadi Rp88.233 Miliar*, 14 Mei 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

- Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
- Pasal 4 menyebutkan:
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah